

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu Ketersediaan Pangan (KP), Keterjangkauan Pangan (PK), dan Pemanfaatan Pangan (PP) yang dianalisis melalui sembilan indikator, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketahanan pangan di Nagari Gurun Panjang Selatan berada dalam kategori Cukup Tahan Pangan (CTP) berdasarkan nilai komposit rata-rata selama lima tahun (2020–2024) sebesar 4,1386, namun menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun.
2. Ketersediaan Pangan (KP) mengalami penurunan dari 10,9184 ke 10,0842, yang menggambarkan berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal terhadap kebutuhan masyarakat. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk (dari 2.460 jiwa menjadi 2.935 jiwa) dan stagnasi lahan pertanian, di mana dari total 390 hektar, hanya 75 hektar berupa sawah yang menjadi tumpuan produksi padi.
3. Meskipun Keterjangkauan Pangan (PK) menunjukkan sedikit peningkatan dari 1,0252 ke 1,1388, hal ini belum cukup untuk menahan penurunan total skor ketahanan pangan. Artinya, meskipun masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan, kualitas dan pemanfaatan pangan tersebut masih belum memenuhi standar ketahanan pangan yang ideal.
4. Komponen Pemanfaatan Pangan (PP) merupakan penurunan paling signifikan dalam skor ketahanan pangan, dengan nilai yang menurun dari 0,8224 pada tahun 2020 menjadi 0,4398 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aspek konsumsi pangan bergizi, sanitasi, dan pendidikan gizi belum optimal di masyarakat.
5. Ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan masyarakat, seperti terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan (indikator X5),

tingginya prevalensi *Stunting* (X8), dan masih terbatasnya akses terhadap air bersih (X6). Hal ini mempertegas bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan pola konsumsi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah nagari dan kabupaten perlu menyusun kebijakan ketahanan pangan berbasis data lokal, dengan fokus pada akses air bersih, *Stunting*, dan tenaga kesehatan, serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan usia produktif, dalam gizi, sanitasi, dan pengolahan pangan bergizi perlu diperkuat melalui integrasi program seperti Posyandu, PKK dan kelompok wanita tani (KWT).

